

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

Jakarta, 30 Juni 2022

Kepada Yth:

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara - Jakarta

Perkara Nomor: 38/G/KI/2022/PTUN - JKT

Jalan A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gerbang,

Jakarta Timur 13950

**PERIHAL : PERMOHONAN DARI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MEMBERIKAN
PUTUSAN YANG ADIL BAGI WARGA DAIRI DENGAN
MENGUATKAN PUTUSAN KIP NOMOR : 039/VIII/KIP-PS-A-/2019,
TANGGAL 22 JANUARI 2022**

Dengan Hormat,

Perusahaan tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM) merupakan perusahaan eksplorasi biji seng dan timah hitam di wilayah pegunungan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam dengan metode penambangan bawah tanah. Proyek ini berawal tahun 1998, saat PT. Dairi Prima Mineral mendapat izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi logam, timah dan seng di wilayah seluas 27.420 hektar melalui skema Kontrak Karya (KK) generasi ke VII yang ditandatangani Presiden Soeharto dengan Nomor KW. 99 PK 0071 tahun 1998 namun pada tahun 2017 terjadi penciptaan wilayah konsesi menyesuaikan dengan UU Minerba No 4 tahun 2009 dan diubah menjadi UU Minerba No 3 tahun 2020 menjadi 24.636 Ha. Pusat proyek ini berada di dusun Sopo Komil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Kepemilikan saham PT. DPM dari dua perusahaan China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co, Ltd. (NFC), perusahaan yang berbasis di Tiongkok merupakan pemilik mayoritas (51%). Sementara, Bumi Resources Minerals, 49% yang merupakan milik Keluarga Aburizal Bakrie perusahaan dari pertambangan batu bara terbesar Indonesia.

PT. DPM berencana akan membangun Tailing Storage Facility (TSF) atau bendungan penyimpanan limbah beracun yang berlokasi di hulu desa Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi dengan luas ±24 ha. Bendungan limbah ini mengancam keselamatan ratusan ribu jiwa masyarakat, lahan pertanian, sungai, sumber air bagi warga yang berada di sekitar tambang maupun hilir dan akan mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan secara tidak langsung dari limbah beracun, dimana perempuan rentan mengalaminya. Selain itu lokasi bendungan yang akan dibangun berada di belakang gereja HKBP Sikhem yang rencananya akan direlokasi, hal ini juga mendapat berbagai respon dari beberapa pihak yang menyatakan sikap penolakan terhadap relokasi gereja tersebut. Hal ini sejalan dengan surat Ephorus HKBP sebagai pemimpin tertinggi Gereja HKBP melalui surat tertanggal 9 Juni 2021 kepada PT. DPM tentang sikap HKBP menolak rencana relokasi Gereja HKBP. TSF yang akan dibangun berada: di atas tanah yang tidak stabil dari debu abu vulkanik akibat dari letusan Gunung Toba, berada di daerah curah hujan tinggi dan dilalui jalur patahan renun yang merupakan patahan megathrust terbesar di Asia dengan resiko gempa tertinggi di dunia. Perusahaan ini juga berpotensi akan menggunakan sumber air Lae Puccu atau sumber air PDAM yang memasok kebutuhan air bersih masyarakat di tujuh (7) desa dan 1 kelurahan

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

(Longkotan, Tuntung Batu, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Siratah dan Hutaginang) dan satu kelurahan Parongil, diperkirakan jumlah pengguna PDAM ± 6000 jiwa.

PT. DPM mengkapling lahan pertanian, perladangan termasuk pemukiman warga juga fasilitas khusus dan fasilitas umum tanpa adanya keterbukaan informasi atas Renegosiasi Kontrak Karya dan Izin pertambangan, hal ini mengakibatkan warga sekitar pertambangan berpotensi menjadi korban karena tidak mengetahui kejelasan nasib mereka.

Pada Agustus tahun 2019 salah seorang warga Dairi, Serly Siahaan (mewakili masyarakat Dairi) mengajukan permohonan keterbukaan informasi tentang keberadaan PT. DPM (KK renegosiasi dan izin produksi) ke Komisi Informasi Pusat.

Pada hari Kamis, 20 Januari 2022, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui putusan KIP putusan Nomor: 039/VIII/KIP-PS-A/2019 tanggal 20 Januari 2022 memenangkan warga Dairi atas sengketa Informasi Publik antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan warga Dairi-Sumatera Utara yang diwakili Serly Siahaan. Putusan KIP tersebut mewajibkan Kementerian ESDM membuka salinan dokumen Kontrak Karya Hasil Renegosiasi Terbaru dan Salinan SK Kontrak Karya Nomor 272.K/30/D/DJB/2018 beserta dokumen pendukung milik PT. Dairi Prima Mineral (DPM). Alih-alih membuka data dokumen tambang yang diwajibkan melalui Putusan KIP, Kementerian ESDM melalui kuasa hukumnya justru mengajukan keberatan (banding) terhadap putusan KIP tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah melaksanakan persidangan sengketa informasi publik sejak bulan April 2022. Dan perkara ini akan diputuskan pada hari Selasa 5 Juli 2022.

Warga Dairi saat ini menunggu keadilan melalui pusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Perjuangan warga Dairi ini terkait dengan **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK** yang merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan diatur dalam UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permohonan keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh warga Dairi merupakan bagian dari perjuangan warga untuk tahu tentang pembangunan di daerah mereka, tindakan yang memiliki relevansi terhadap keberlanjutan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dan peningkatan kualitas masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Hal ini adalah karena aktivitas PT. DPM tentu akan berdampak buruk pada keberlangsungan ruang hidup warga ke depan dan bercermin dari berbagai potret bencana-bencana ekologis industri ekstraktif pertambangan di Indonesia membawa daya rusak tambang lintas generasi.

Upaya kementerian ESDM dalam menutupi dan menyembunyikan informasi tentang Kontrak Karya pertambangan PT. DPM merupakan kebijakan yang keliru dan menyesatkan, sebab hal ini menunjukkan Kementerian ESDM lebih mengutamakan kepentingan investasi dan korporasi daripada keselamatan rakyat Dairi dan lingkungan hidup di Dairi. Faisal Basri

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

menyatakan “*Ketidakterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan kemunduran negara yang tidak menjalankan komitmen internasional sebagai anggota Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) yang justru pelaksanaannya ada di KESDM.*”

PERMOHONAN

Persidangan perkara ini akan memasuki masa akhir melalui putusan Majelis Hakim, karena itu kami memohon Majelis Hakim agar objektif, profesional, dan independen saat memutuskan perkara yang menyangkut keselamatan ratusan ribu warga Dairi, Sumatera Utara.

Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan urgensi bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kedua, putusan majelis hakim akan menentukan iklim negara demokrasi dan pemenuhan hak azasi manusia yaitu pemenuhan hak dasar warga negara atas informasi publik sesuai mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Dipertegas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Atas dasar penjelasan di atas, maka dalam hal ini kami **SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta) yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memberikan keadilan bagi warga Dairi-Sumatera Utara dengan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 039/VIII/KIP-PS-A-/2019, tanggal 20 Januari 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA
DAIRI-SUMATERA UTARA**

AHMAD JAETULOH

Manager Advokasi dan Kampanye Sayogo Institute

(*ATAS NAMA SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA
DAIRI-SUMATERA UTARA*)

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

Daftar SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA Pendukung Surat Permohonan:

1. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
2. Yayasan PETRASA (Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam)
3. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
4. Anak Rantau Dairi
5. Sayogo Institute
6. Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
7. Organisasi Perempuan Marsitoguan Desa Lae Panginuman-Dairi
8. Organisasi Perempuan Sion desa Bonian-Dairi
9. FORMATPETALIHI (Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup)
10. Organisasi Masyarakat Marsitoguan Desa Bongkaras-Dairi
11. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
12. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) di Indonesia
13. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Sumatera Utara
14. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Papua Barat
15. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Papua
16. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Jabotabed
17. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Jatim,
18. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region NTT
19. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Kalteng-sel
20. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Bali
21. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Maluku
22. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Jateng-DIY
23. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Sulawesi
24. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region KALBAR
25. Yayasan KDM JKLPK Region Jabotabed
26. Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala JKLPK Region Jabotabed
27. Obor Hidup Lestari
28. Komunitas Tuak Pedis
29. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
30. Palapa Indah
31. Perhimpunan Pemberdayaan Perempuan Pijer Podi (YAPIDI)
32. Serikat Tani Tanah Karo (STTK)
33. Yayasan Ate Kelleng (YAK)
34. BITRA Indonesia
35. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
36. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

37. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi
38. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
39. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara
40. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan
41. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu
42. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Nasional
43. Bersihkan Indonesia
44. Komunitas Difable di Jakarta
45. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
46. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak
47. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
48. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
49. Pesekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN)
50. PW AMAN Sumatera Utara
51. Save Sangihe Island
52. Komunitas Wadas
53. Srikandi Lestari–Medan
54. Serikat petani Kabupaten Samosir (STKS)
55. Serikat petani Kabupaten Toba (ST-Toba)
56. Serikat petani Wilayah Taput (ST-Taput)
57. Masyarakat Adat Humbang Hasundutan
58. Perhimpunan Petani Organik Dairi (PPODA)
59. United Evangelical Mission (UEM)
60. JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA (JERAT PAPUA)
61. FIAN Indonesia
62. Borneo Institute
63. Yayasan Kedai Masyarakat (KEMAS)
64. Organisasi Perempuan Sada roha desa Lae Haporas-Dairi
65. Organisasi Perempuan Saroha desa desa Lae Markelang-Dairi
66. Organisasi Perempuan Marsiurupan desa Sinar Pagi-Dairi
67. Organisasi Maju Bersama desa Pandiangan-Dairi
68. Organisasi Perempuan Ina Logan Desa Lae Logan –Dairi
69. Persekutuan Perempuan Berpendidikan Theologi (PERUATI)
70. Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas Indonesia (LBH Disabilitas Indonesia)
71. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
72. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HOPE
73. Forest Watch Indonesia
74. Yayasan Satu Keadilan
75. Paritas Institute
76. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
77. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
78. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
79. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

80. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
81. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya
82. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda
83. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung
84. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Pekanbaru
85. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh
86. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan
87. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang
88. Greenpeace Indonesia
89. Solidaritas Advokat Indonesia (SAI)
90. Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia
91. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
92. BHR Institute
93. Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia
94. Sawit Watch
95. Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)
96. Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA)
97. CU. Miduk bonian
98. CU.Marsiantusan Bakkal Gajah
99. CU. Lamganda Sumbari
100. CU. MajuTani Lae Ambat
101. CU. Bersinar Lae Ambat
102. CU. Sinta Mardongan di Lae Panginuman
103. CU. KARYA BERSAMA di NJANJI
104. CU. CINTA MAKMUR _JANJI
105. CU. SOALA GOGO URUK MBLIN
106. CU. MARTABE _LAE PANGAROAN
107. Komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS)
108. KontraS Sumatera Utara
109. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
110. JPIC OFM Indonesia
111. Pustaka Lewi
112. Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM)-KALBAR
113. Perkumpulan Pondok Pergerakan
114. Yayasan Palapa Indonesia
115. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)
116. Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sumut,
117. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
118. Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia (KNLWF)
119. FEDERASI SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR
120. Gerakan Nasional Pelita Bangsa (GNPB)
121. Forum Pekalongan Bangkit (FPB)

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK WARGA DAIRI-SUMATERA UTARA

Jl. Utan Kayu Raya No. 103 Aa RT 002 RW 008 Kel. Utan Kayu Raya Kec. Matraman, Jakarta Timur,

122. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Kabupaten Pemalang (DPC AWPI)
123. Koalisi Kawali Indonesia Lestari
124. Green Justice Indonesia
125. Serikat Hijau Indonesia Kabupaten Karo
126. Remaja Pecinta Alam (REPALA Indonesia)
127. Departemen Diakonia Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
128. HKBP AID'S Ministry
129. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Hutaimbaru, Distrik VI Dairi
130. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sidiklang
131. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan/ Bidang Keadilan dan Perdamaian
132. BADAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN GMT.
133. Yayasan Dian Tama-Pontianak
134. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
135. Trend Asia
136. Hutan Rakyat Institute (HaRi)
137. Perkumpulan HuMa Indonesia
138. Aliansi Sumut Bersatu (ASB)

Tembusan:

Kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Ketua Komisi Yudisial
5. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)